

BAB III

KEBIJAKAN *SUNSHINE POLICY* SEJAK ERA KIM DAE JUNG

Bab III ini akan membahas tentang kebijakan *Sunshine Policy*. Dimana kebijakan ini digunakan oleh Moon Jaen In dalam menyelesaikan permasalahan dengan Korea Utara. Dan kebijakan *Sunshine Policy* sudah pernah digunakan pada era pemerintahan Presiden Kim Dae Jung dan Roh Moon-hyun.

Bab ini akan menunjukkan bagaimana awal terbentuknya, apa tujuannya, dan prinsip dari kebijakan *Sunshine Policy*. Serta penulis akan menjelaskan tentang kebijakan *Sunshine Policy* pada era Kim Dae Jung, Roh Moon-Hyun dan Moon Jae In. Sehingga akan terlihat apa yang membedakan dari kebijakan *Sunshine Policy* diantara Presiden Kim Dae Jung, Roh Moon-Hyun dan Moon Jae In.

A. Terbentuknya *Sunshine Policy*

Kebijakan *Sunshine Policy* dibentuk pada tahun 1998 oleh Presiden ke 15 Korea Selatan yaitu Presiden Kim Dae Jung. *Sunshine Policy* merupakan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara yang lebih menekankan pada kerjasama damai, serta menuju rekonsiliasi sebagai awal untuk mengarah ke reunifikasi atau penyatuan Korea kembali (Encyclopedia, 2015).

Istilah *Sunshine Policy* berasal dari salah satu dongeng Aesop, yaitu "The North Wind and the Sun". Dalam dongeng tersebut menggambarkan matahari dan angin bersaing untuk melepaskan mantel seorang pria. Angin berhembus sangat kencang, tetapi pria tersebut mencengkeram mantelnya dan terus memakainya. Sedangkan saat matahari bersinar, lelaki itu secara sukarela melepas mantelnya untuk menikmati cuaca cerah (Encyclopedia, 2015).

Inti dari kebijakan *Sunshine Policy* berasal dari Ostpolitik, yaitu upaya normalisasi Jerman Barat menuju

Jerman Timur. Dimana pemerintah Jerman Barat mengakui Jerman Timur tidak hanya sebagai negara yang normal dan berdiri sendiri, tetapi juga sebagai negara yang sangat dekat. Jerman Barat juga mendukung Jerman Timur dengan memberikan bantuan 57,6 miliar dolar. Berdasarkan kebijakan sukses yang dilakukan oleh Jerman Barat yang akhirnya mengarah pada unifikasi yang sukses dengan Jerman Timur, maka Presiden Kim memperkenalkan tiga prinsip utama untuk *Sunshine Policy* dengan mempertimbangkan keunikan semenanjung Korea (Min, 2017).

Sunshine Policy didasarkan pada tiga prinsip berikut:

1. Jika ada bentuk provokasi bersenjata yang dilakukan oleh Korea Utara, Korea Selatan tidak akan memberikan toleransi.
2. Korea Selatan tidak akan berusaha untuk menyerang Korea Utara dengan cara apa pun.
3. Korea Selatan secara aktif mencari kerja sama.
Secara eksplisit prinsip ini menyatakan bahwa Korea Selatan akan mengupayakan adanya investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Korea Utara jika Korea Utara bersikap kooperatif (Min, 2017).

Kemudian prinsip-prinsip tersebut diperluas kembali oleh Kementerian Unifikasi Korea menjadi sebagai berikut:

1. Korea Selatan dan Korea Utara secara bersama-sama berusaha untuk mencapai keamanan nasional, kerjasama dan rekonsiliasi.
2. Mewujudkan adanya kehidupan dan pertukaran antar Korea Selatan dan Utara dengan damai.
3. Berusaha menciptakan lingkungan untuk terciptanya sebuah perubahan pada Korea Utara.
4. Korea Selatan dan Utara akan berusaha untuk mencapai kebaikan untuk bersama.

5. Memperoleh dukungan dunia internasional atas terwujudnya *Sunshine Policy*.
6. Korea Selatan bersama Korea Utara akan mewujudkan adanya consensus nasional (Putri, 2015).

Tujuan dari dibentuknya *Sunshine Policy* ini yaitu untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan serta konfrontasi antar kedua negara. Dan juga untuk meredam atau bahkan menghilangkan ketegangan diantara kedua negara yang telah terjadi semenjak adanya perang, agar selanjutnya tercipta keadaan yang damai di kawasan Semenanjung Korea. *Sunshine Policy* sendiri dibentuk berdasarkan konsep kerjasama, perdamaian, dan rekonsiliasi.

Sedangkan prinsip dasar dari *Sunshine Policy* yaitu meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Karena menurut Korea Selatan untuk mendekati Korea Utara lebih mudah melalui bidang ekonomi dibandingkan dengan bidang politik dan keamanan. Hal ini dikarenakan pemerintah Korea Utara sangat membutuhkan adanya bantuan di bidang ekonomi dan pangan. Dan prinsip dasar lainnya yaitu *reciprocity*. Kim Dae Jung mengartikan hal tersebut sebagai hubungan timbal balik diantara Korea Selatan dan Utara. Diharapkan dengan adanya *Sunshine Policy*, kedua negara akan sama-sama diuntungkan (Putri, 2015).

Setelah terbentuk prinsip-prinsip dasar *Sunshine Policy*, Kim kemudian membuat kunci aktivitas agar yang dilakukan kedepannya sesuai dengan prinsip dan tujuan. Kunci aktivitas *Sunshine Policy* sebagai berikut:

1. Upaya untuk memulai kembali pembicaraan yang sempat ditangguhkan dan memperluas dialog politik antara kedua Korea. Ini mewakili tujuan utama pemerintah agar dapat berkomunikasi kembali dengan Korea Utara.
2. Untuk menangani hubungan ekonomi Korea Selatan dan Utara. Ini melibatkan berbagai upaya di Korea Selatan

sendiri, seperti mendorong para pengusaha Korea Selatan untuk mengunjungi Korea Utara, mengangkat batas atas besarnya investasi yang diperbolehkan di Utara. Hal ini juga melibatkan adanya kesepakatan dengan Korea Utara mengenai hal-hal seperti mencegah pajak yang berlebihan dan menjamin investasi untuk meningkatkan interaksi ekonomi kedua negara.

3. Berfokus pada pertemuan kembali antar keluarga yang dipisahkan oleh Perang Korea. Ini merupakan salah satu prioritas utama dari *Sunshine Policy*.
4. Menyediakan makanan dan bantuan kemanusiaan adalah rangkaian kunci aktivitas keempat dari *Sunshine Policy*. Bantuan makanan yang diberikan Korea Selatan terhadap Korea Utara sangat berpengaruh. Mengingat kondisi Korea Utara sendiri yang sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan darurat atau bantuan makanan lainnya melalui organisasi internasional atau dengan memberikannya secara langsung. Untuk meningkatkan produksi pertanian Korea Utara, pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan berupa bibit dan pestisida. Dan Korea Selatan memberikan bantuan berupa obat-obatan untuk menanggulangi penyakit yang menular dan lainnya akibat dari penyakit kekurangan gizi. Dan pemerintah secara aktif mendorong pihak swasta dan organisasi sipil lainnya untuk memberikan bantuan tambahan berupa makanan, pupuk dan bantuan kemanusiaan lainnya.
5. Upaya yang lebih luas untuk mendorong kerjasama internasional. Hal ini bertujuan untuk meredam ketegangan kedua negara dan menjaga perdamaian di kawasan Semenanjung Korea (Han N. D.-S., 2002).

B. *Sunshine Policy* di Era Kim Dae Jung

Setelah membentuk *Sunshine Policy*, Kim Dae Jung segera mengesahkan dan menerapkan kebijakan tersebut. Langkah awal Kim untuk menerapkan *Sunshine Policy* yaitu dengan mengadakan pertemuan diplomatik dengan pemimpin Korea Utara yaitu Kim Jong Il. Pertemuan tersebut di adakan di Pyeongyang, Korea Utara pada tahun 2000. Kemudian pertemuan ini yang menjadi pembuka bagi hubungan bilateral antar kedua negara (Putri, 2015).

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dilaksanakan pada 15 Juni 2000, yang mempertemukan antara Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il. Hal ini telah dianggap sebagai pencapaian terbesar dari *Sunshine Policy*. Ini merupakan pertama kalinya para pemimpin dari kedua Korea bertemu kembali sejak tahun 1948. Dalam pertemuan tersebut banyak masalah yang dibahas secara rahasia. Contohnya, dilaporkan bahwa Kim Jong Il akan melakukan kunjungan timbal balik ke Seoul tetapi tanggalnya tidak diungkap. Dan para pemimpin setuju untuk mengikuti program pengurangan senjata khusus dengan tujuan untuk mengurangi ancaman perang di kawasan semenanjung Korea.

Kim Dae Jung dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggiperdamaian dan non-konfrontatif, hal ini tampaknya dapat meredakan ketegangan di Semenanjung Korea. Sehingga dalam pertemuan tersebut dapat menghasilkan Joint-Declaration yang mempunyai lima poin sebagai berikut:

1. Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk menyelesaikan masalah terkait reunifikasi secara independen tanpa adanya gangguan dari pihak eksternal.
2. Kedua Korea mengakui adanya unsur-unsur bersama dalam membuat rencana reunifikasi.
3. Korea Selatan dan Korea Utara menyetujui untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yaitu dengan

mengadakan reuni keluarga dimana banyak orang yang sudah lama terpisah dari keluarganya pasca perang Korea.

4. Kedua Korea telah sepakat untuk saling percaya dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang seimbang dengan cara melakukan kerjasama ekonomi bilateral.
5. Kedua Korea telah sepakat untuk mengadakan dialog untuk segera menerapkan poin-poin yang sudah disetujui (Govindasamy, 2012).

Adanya keputusan Joint-Declaration menandai langkah awal hubungan kedua negara. Dibuatnya *Sunshine Policy* ini juga merupakan bentuk kepercayaan Korea Utara yang dirasa akan lebih bersikap lunak dengan adanya *Sunshine Policy*. Atas keberhasilan *Sunshine Policy* ini, Kim Dae Jung memperoleh Penghargaan Nobel (Moon, 2012).

Setelah diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), kedua negara kembali melakukan pertemuan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Korea Utara. Pertemuan tersebut membahas tentang upaya normalisasi hubungan kedua negara. Berdasarkan hasil Joint-Declaration, kedua Menteri Pertahanan sepakat untuk berusaha meningkatkan kepercayaan satu sama lain dan juga berusaha meredakan ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Korea Selatan dan Utara juga telah sepakat untuk memasang telepon langsung agar komunikasi antar kedua negara dapat berjalan lancar apabila akan melaksanakan latihan militer. Selain itu, hasil dari pertemuan kedua Menteri Pertahanan sepakat untuk membangun proyek rel kereta api. Hal ini harus mendapat bantuan dari Menteri Pertahanan karena wilayah-wilayah yang akan dibangun proyek tersebut berada di wilayah yang banyak terdapat fasilitas militer (Seung-Yoon, 2005).

Selain itu, berkat *Sunshine Policy* kedua Korea bahkan melakukan kerjasama dibidang olahraga. Seperti pada tahun 1999, Korea Selatan membangun gedung olahraga di

Pyeongyang. Pembangunan gedung olahraga tersebut disponsori oleh *Hyundai Bussines Group*. Tidak hanya sampai disitu, pada saat Olimpiade di Sydney pada tahun 2000 kedua Korea berada dibawah satu bendera unifikasi Korea atau bendera Semenanjung Korea (Seung-Yoon, 2005).

Namun, *Sunshine Policy* tidak hanya memberikan hasil yang positif saja. Pada tahun 2002, Korea Utara mulai mengembangkan uji nuklirnya kembali. Hal ini tentu membuat Korea Selatan terancam akan stabilitas keamanannya. Tetapi, pihak Korea Utara mengatakan hal itu merupakan bentuk pertahanan negaranya. Dengan adanya hal ini, maka *Sunshine Policy* sudah tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal.

Pada tanggal 29 Juni 2002, terjadi pertempuran antara Korea Selatan dan Korea Utara di wilayah laut perbatasan. Hal itu mengakibatkan tewasnya 4 pelaut asal Korea Selatan. Dan korban dari Korea Utara tidak diketahui berapa jumlahnya, serta kapal milik Korea Utara yang dikabarkan tenggelam. Korea Selatan mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kapal milik Korea Utara melewati batas wilayah. Pihak Korea Selatan sudah memberikan peringatan terhadap Korea Utara, namun pihak Korea Utara justru melawan dengan menembaki kapal patroli Korea Selatan. Sedangkan menurut Korea Utara, Korea Selatanlah yang memulai pertempuran tersebut dengan menembaki kapal milik Korea Utara dan mereka hanya melakukan pembelaan diri. Peristiwa tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan antar kedua Korea (Gunawan, 2015).

Bagaimanapun juga, Kim Dae Jung telah berhasil memberikan dampak positif bagi hubungan Korea Selatan dan Utara melalui *Sunshine Policy* meskipun hal itu belum sepenuhnya berhasil. Namun, hal itu tidak membuat Kim menyerah untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Setelah berakhir masa jabatannya menjadi Presiden, Kim berusaha membantu Roh Moon-hyun agar menjadi Presiden selanjutnya. Hal ini dikarenakan, Kim

menginginkan Roh melanjutkan kebijakannya yaitu *Sunshine Policy*.

C. Sunshine Policy di Era Roh Moon-hyun

Pada tahun 2003, Roh Moon-hyun terpilih menjadi Presiden Korea Selatan menggantikan Kim Dae Jung. Roh merupakan tokoh liberal, pada masa kampanye Roh secara konsisten mengatakan bahwa untuk kemakmuran dan eksistensi bangsa, maka *Sunshine Policy* masih diperlukan sehingga kebijakan tersebut harus dilanjutkan. Roh Moon-hyun dikenal sebagai tokoh yang anti terhadap Amerika Serikat. Hal itu diperlihatkan Roh dengan sering mengkritik pemerintahan Amerika. Sikap anti terhadap Amerika Serikat tersebut dimanfaatkan Roh untuk menarik perhatian masyarakat khususnya bagi pemilih muda yang menginginkan adanya hubungan yang lebih setara dengan Amerika Serikat. Roh juga mengatakan bahwa ia akan lebih bersikap netral jika perang terjadi antara Amerika dan Korea Utara (Kim C. N., 2006).

Roh memilih menggunakan kebijakan "*The Policy Of Peace And And Prosperity*" dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ini merupakan istilah yang sama dengan *Sunshine Policy*. Pada pelantikannya menjadi Presiden, Roh Moon-hyun menyampaikan pidato pertamanya dengan judul "*An Age of Northeast Asia Begins: A New Takeoff Toward an Age of Peace and Prosperity*". Dalam pidatonya tersebut, Roh berjanji akan mempertahankan kerangka umum yang terdapat pada *Sunshine Policy* yang mempunyai tujuan untuk membangun perdamaian yang permanen di kawasan Semenanjung Korea dan mempromosikan kemakmuran di Asia Timur. Roh juga menyampaikan bahwa "*We have to change the peninsula into a land that sends out messages of peace that connects the Eurasian landmass with the Pacific Ocean.*" Ini merupakan tujuan yang lebih luas jika dibandingkan dengan *Sunshine Policy* sebelumnya dimana

hanya berfokus pada upaya rekonsiliasi antar kedua Korea (Kim C. N., 2006).

Meskipun demikian, upaya rekonsiliasi dengan Korea Utara tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Roh. *The Policy Of Peace And Prosperity* tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas ruang lingkup dari kebijakan sebelumnya yaitu *Sunshine Policy* tetapi juga dimaksudkan untuk mempercepat pertukaran dan kerjasama antar Korea. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memperkuat perdamaian dan kemakmuran di kawasan Semenanjung Korea dan sebagai landasan untuk pembangunan unifikasi yang damai serta menjadikan Korea Selatan menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia Timur (Kim C. N., 2006).

Roh telah sering mengungkapkan harapannya terhadap Korea Selatan dan Utara untuk dapat menandatangani perjanjian perdamaian, hal itu agar stabilitas keamanan di kawasan Semenanjung Korea terjamin. Bagi Roh, reunifikasi Korea tidak dapat dihindari dalam satu maupun dua dekade, semakin cepat pihak Korea Selatan membawa ekonomi dan infrastruktur Korea Utara keluar dari status dunia ketiga maka akan semakin mudah pula proses unifikasi akan tercapai. Roh juga berkata bahwa *"I would not mind the failures of all other policies only if the North Korea policy were successful."* Korea Selatan di bawah pemerintahan Roh Moon-hyun menjadi negara yang paling damai dengan Korea Utara, bahkan mungkin hampir setara dengan negara sekutunya yaitu Tiongkok.

Presiden Roh kemudian melanjutkan proyek-proyek yang dulunya sudah direncanakan pada masa pemerintahan Kim Dae Jung. Proyek-proyek tersebut antara lain, pada tahun 2003 telah diresmikan kawasan wisata dan turisme Gunung Kumgang. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang berada di wilayah perbatasan Korea Selatan dan Utara. Roh percaya bahwa dengan meningkatnya kerjasama di bidang perdagangan dan bisnis akan mengurangi ketegangan antar keduanya di bidang militer. Kemudian pada tahun 2004, telah

dibuka kawasan Industri Kaesong. Pada tahun 2006, terdapat 300 perusahaan yang telah mulai beroperasi dan lebih dari 2000 perusahaan yang melakukan investasi di kawasan tersebut. Dengan adanya industri tersebut, Korea Utara telah mendapatkan pendapatan sekitar 2 milyar pertahunnya. Dan di tahun yang sama, kedua Korea sepakat untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan kedua negara (Putri, 2015).

Roh juga telah bekerja keras untuk mempertahankan hubungan Korea Selatan dan Utara yang sudah membaik sejak era Kim Dae Jung. Di era Kim Dae Jung, Korea Selatan telah sepakat untuk memasok pupuk dan beras ke Korea Utara. Hal itu juga dilakukan oleh Roh Moon-hyun pada tahun 2003 dan 2004 dengan memasok 300.000 ton pupuk dan 400.000 ton beras (Kim C. N., 2006). Pertemuan kembali keluarga yang terpisah pun kembali dilkakukan pada masa pemerintahan Roh. Pertemuan tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan bertatap muka secara langsung dan melalui video. Pertemuan yang dilakukan secara langsung telah mempertemukan setidaknya 3.378 keluarga dan melalui video sekitar 557 keluarga (Widyasari, 2013). Dan pada tahun 2007, Roh berhasil menyelenggarakan Summit 2007 di Pyeongyang. Pada pertemuann tersebut keduanya membahas tentang kerjasama di bidang ekonomi.

Namun, tujuan dari kebijakannya yang ingin membuat Korea Selatan menjadi pusat ekonomi di Asia Timur dianggap terlalu ambisius dan idealis oleh beberapa anggota parlemen dari partai pemerintah. Bahkan, pemerintah Roh dianggap lebih retorik dan amatiran dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri. Roh sendiri dapat dikatakan kurang memahami isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Roh Moon-hyun juga memusatkan kekuatan dalam pembuatan kebijakan luar negeri kepada *National Security Council* yang dipimpin oleh Lee Jong-Seok. Namun, seringkali Lee mengabaikan isu-isu penting seperti keamanan dan pertahanan sehingga kebijakan luar negeri yang dibuatnya tidak tepat (Kim C. N., 2006).

Pada masa pemerintahan Roh memang lebih berfokus pada bidang ekonomi. Menurut Roh cara ini merupakan cara yang efektif untuk menuju reunifikasi kedua Korea. Roh juga memusatkan perhatiannya pada Korea Utara dengan sifat yang anti terhadap Amerika Serikat. Roh telah menaruh kepercayaannya lebih besar kepada Korea Utara. Namun hasil dari *Sunshine Policy* pada masa pemerintahannya terdapat ketimpangan didalamnya. Hal itu dikarenakan karena sedikitnya timbal balik dalam hubungan kedua Korea. ini dibuktikan dengan masih dibangunnya kekuatan nuklir oleh Korea Utara. Padahal disisi lain, Korea Selatan telah memberikan sejumlah bantuan kepada Korea Utara yang nilainya cukup besar. Kepercayaan yang diberikan Korea Selatan terhadap Korea Utara dimanfaatkan oleh Korea Utara dengan terus menerus meminta bantuan kepada Korea Selatan (Putri, 2015).

D. Sunshine Policy di Era Moon Jae In yang lebih terbuka

Moon Jae In berhasil memenangkan pemilihan Presiden Korea Selatan pada tahun 2017 dengan mendapat 41% suara. Moon berhasil mengalahkan Hong Joon-pyo and Ahn Cheol-soo yang berasal dari partai konservatif dengan masing-masing suara 23% dan 22%. Moon telah berjanji akan membawa kembali *Sunshine Policy* yang dahulu pernah digunakan Kim Dae Jung dan Roh Moon-hyun (Boydston, 2017).

Pada saat kampanye pemilihan Presiden, Moon telah bersumpah untuk kembali menjalin kontak dengan Korea Utara setelah Presiden sebelumnya yaitu Park Geun Hye yang telah memutuskan kontak dengan Korea Utara pada tahun 2006. Hal itu dikarenakan oleh Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang keempat. Seperti yang sudah diketahui, Korea Utara pada masa pemerintahan Park Geun Hye menjadi lebih masif dalam melakukan uji coba nuklir. Terhitung sudah 12 kali Korea Utara melakukan uji coba nuklir dari tahun 2015 hingga 2018. Ini merupakan angka tertinggi Korea Utara melakukan uji

coba nuklir jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya (Kami, Peluncuran Rudal Korut dari Masa ke Masa, Makin Mengkhawatirkan, 2017).

Keinginan Moon untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dimulai dengan adanya pertemuan antara perwakilan Korea Selatan yaitu penasihat keamanan nasional, Chung Eui-Yong dengan Presiden Korea Utara yaitu Kim Jong Un pada Maret 2018. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas tentang denuklirisasi di wilayah Semenanjung Korea dan upaya perdamaian yang permanen. Serta Korea Selatan akan membantu Korea Utara dan Amerika Serikat melakukan pertemuan dan dialog (VOA, Kim Jong-un Bertemu dengan Para Pejabat Korea Selatan, 2018) .

Pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara kembali dilakukan pada April 2018. Pada pertemuan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae In bertemu langsung dengan Kim Jong Un. Keduanya bertemu di garis demarkasi militer yang berada di Desa Panmunjom. Moon dan Kim berjabat tangan sebagai simbol bahwa keduanya telah sepakat melakukan perdamaian. Dalam pertemuan ini, terdapat 9 point yang telah disepakati kedua negara. Kesepakatan tersebut antara lain:

1. Kedua Korea sepakat untuk mengakiri perang yang sebelumnya telah ditangguhkan dalam perjanjian gencatan senjata 1953.
2. Kedua Korea telah sepakat untuk melakukan denuklirisasi dan membuat kawasan di Semenanjung Korea bebas dari ancaman nuklir.
3. Pada musim gugur, Moon Jae In akan berkunjung ke Korea Utara.
4. Kedua Korea telah sepakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memicu ketegangan baik di medan laut, udara maupun darat.
5. Kedua Korea akan menghentikan siasan yang memicu propaganda di wilayah perbatasan yang akan dimulai pada bulan Mei.

6. Kedua Korea telah sepakat untuk membangun kantor yang difungsikan sebagai penghubung dan akan dioperasikan secara bersama-sama yang terletak di wilayah Gaeseong, Korea Utara.
7. Akan mengadakan kembali pertemuan keluarga yang terpisah sejak perang Korea pada tanggal 15 Agustus 2018.
8. Akan membangun kembali jalur rel kereta api yang dapat menghubungkan kedua negara di wilayah Pantai Timur.
9. Kedua Korea akan berpartisipasi dalam Asean Games 2018 secara bersama-sama (Tribunnews, 2018).

Pertemuan selanjutnya, Moon Jae In melakukan kunjungan ke Pyeongyang, Korea Utara pada September 2018. Agenda pertemuan ini membahas tentang perdamaian kedua negara yang selanjutnya membahas tentang unifikasi. Dalam pertemuan ini juga membahas tentang pelucutan senjata nuklir di kawasan Semenanjung Korea (CNN, Kim Jong-un Sambut Moon Jae-in di Bandara Korut, 2018).

Meskipun *Sunshine Policy* sudah pernah digunakan Kim Dae Jung dan Roh Moon-hyun, namun Moon memiliki strategi sendiri dalam menerapkan kebijakan tersebut. Setelah menjabat sebagai kepala sekretaris kepresidenan selama satu tahun di bawah Presiden Roh Moo-hyun, Moon sangat menyadari kelemahan utama dari *Sunshine Policy* dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang lalu atau bahkan memperburuknya.

Terdapat beberapa aspek yang membedakan strategi Moon dengan para pendahulunya. Yang pertama, Moon memilih sikap waspada dan telah memutuskan untuk tidak membuat konsesi ekonomi kepada Korea Utara sebelum adanya KTT. Meskipun pemerintah Korea Selatan telah memutuskan pada September lalu untuk mengirim bantuan kemanusiaan senilai \$ 8 juta kepada Pyongyang, Korea Utara. Bantuan tersebut berupa, produk untuk anak-anak dan wanita hamil, vaksin dan perawatan medis yang disalurkan melalui World Food

Program dan UNICEF, namun langkah tersebut hanya menegaskan bahwa tujuan Moon adalah untuk membantu warga Korea Utara yang membutuhkan bantuan dan bukan untuk berkontribusi untuk mendukung rezim Korea Utara. Moon tidak ingin digambarkan sebagai orang yang memberikan uang yang melintasi perbatasan tanpa mendapatkan imbalan apa pun (Fiori, 2018).

Kedua, minat yang kuat dari Moon Jae-in untuk mendapatkan dukungan dari dunia internasional pada strategi kebijakannya. Tidak seperti Roh Moon-hyun, Moon belum mencoba menciptakan jarak dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, ia justru telah memilih untuk memberikan sekutunya yaitu Amerika dengan pujian dengan secara terbuka mengakui pentingnya kebijakan “tekanan maksimum” Amerika Serikat dalam membawa kembali Korea Utara ke meja perundingan. Moon selalu secara eksplisit mendukung penerapan sanksi, sehingga mendukung sikap Amerika. Moon tidak ingin terlibat konflik dengan pemerintah AS karena visi mereka yang berbeda seperti yang terjadi dengan pendahulunya ketika George W. Bush menentang Sunshine Policy (selama fase akhir dari kepresidenan Kim Dae Jung dan selama masa pemerintahan Roh Moo-hyun). Moon akan menunjukkan kepada negaranya bahwa dia tidak menerima perintah dari Amerika Serikat, tetapi dia lebih suka bekerja sama (Fiori, 2018).

Ketiga, pada masa pemerintahan Moon Jae In, ia ingin mengambil langkah awal untuk menuju rekonsiliasi dengan mencapai kesepakatan dengan Korea Utara pada sejumlah masalah di ranah sipil, seperti menyatukan kembali keluarga yang telah terpisah akibat perang, penggunaan bersama sumber daya air di daerah perbatasan, upaya bersama untuk memerangi malaria, dan partisipasi para atlet Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Moon bahkan telah mengusulkan untuk menciptakan komunitas ekonomi di bidang produksi, barang konsumsi dan ekspor (Mosler, 2017).

Keempat, dengan intensifnya pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara telah menghasilkan sebuah kebijakan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hal tersebut yaitu pembongkaran pos penjagaan di wilayah demarkasi militer. Sebanyak 10 pos penjagaan milik Korea Selatan telah dirobohkan dengan menggunakan ekskavator. Sementara itu sebanyak 10 pos penjagaan milik Korea Utara telah diledakkan. Hal ini pertama kalinya prajurit militer dapat melintasi garis di wilayah demarkasi militer sejak terjadinya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara (Berlianto, 2018).

Pada pertemuan bilateral, keduanya telah sepakat untuk mengembangkan kembali rel kereta api yang menghubungkan kedua negara. Serta Kompleks Industri Kaesong akan dibuka kembali sesegera mungkin dan secara signifikan diperluas di masa depan. Bahkan Moon akan membuka kembali tempat wisata Gunung Kumgang. Seperti yang kita ketahui bahwa, proyek-proyek kerjasama di atas sebelumnya ditutup oleh pemerintah Korea Selatan. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja meski kedua negara telah menyepakatinya. Hal ini dikarenakan, Korea Utara masih dijatuhi sanksi dari PBB. Sanksi tersebut tentunya harus dipatuhi oleh Korea Selatan. Proyek-proyek tersebut akan berjalan jika sanksi yang dijatuhkan PBB pada Korea Utara dicabut. Sehubungan dengan proyek rel kereta api, pihak subkomite PBB akan segera meninjau (CNN, Moon Jae-in dan Kim Jong-un Sepakat Hubungkan Jalur Kereta , 2018).

Moon melihat perlunya mekanisme pertahanan yang kuat dalam bentuk sistem antimissile yang akan dikembangkan Korea Selatan sebagai cara yang efektif untuk melindungi diri terhadap rudal-rudal. Pada saat yang sama, Korea Utara dan Korea Selatan akan memperkenalkan sistem manajemen militer bersama untuk mencegah potensi kesalahpahaman dan kecelakaan. Selain itu, Moon ingin Korea Selatan mendapatkan kembali kendali operasional masa perang (OPCON) atas angkatan bersenjata, yang sekarang

dipegang oleh Amerika Serikat. Sehingga Korea Selatan dapat membuat keputusan sendiri jika terjadi perang (Mosler, 2017).

Berikut tabel perbedaan *Sunshine Policy* di era Kim Dae Jung, Roh Moon-hyun dan Moon Jae In.

Tabel 3. 1. Perbedaan Sunshine Policy di Era Kim Dae Jung, Roh Moon-hyun dan Moon Jae In

Kepemimpinan	Sifat	Aspek	Tujuan
Kim Dae Jung	Anti terhadap Amerika	Ekonomi	Upaya rekonsiliasi antar kedua Korea
Roh Moon-hyun	Anti terhadap Amerika dan Jepang	Ekonomi	Rekonsiliasi dengan Korea Utara dan menjadikan Korea Selatan menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia Timur
Moon Jae In	Pro Amerika	Sipil dan Ekonomi	Rekonsiliasi dengan Korea Utara serta upaya denuklirisasi dan perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea.